

Problem Nilai Dan Moralitas Dalam Modernisasi Pembangunan Ekonomi



Drs. Agus Purwadi

Di masa Orde Lama, malaise di bidang ekonomi begitu menonjol dan mengundang berbagai kerawanan sosial-politik. Harapan baru dari penataan aspek pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh Orde Baru kemudian, tidak lain untuk mengatasi kelangkaan-kelangkaan sumber daya yang ada dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Asumsi yang melandasi harapan baru ini, tidak lain bahwa kemacetan pembangunan, sebagaimana pada masa Orde Lama adalah adanya kelangkaan modal. Untuk itu sangat beralasan bila kebijakan politik untuk pembangunan ekonomi, diarahkan pada aspek pertumbuhan. Mengikuti asumsi itu pula, ditegaskan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang mantap, pembangunan di bidang politik, sosial, dan budaya akan tumbuh secara simultan mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun setidaknya-tidaknya semenjak satu setengah dasa warsa terakhir ini, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi nasional mencapai (mendekati) tujuh persen, justru masalah sosial, politik, keadilan, dan pemerataan semakin menajam. Kesenjangan sosial pun semakin menunjukkan gejalanya yang jauh dari harapan dan asumsi di atas. Mengapa terjadi demikian ? Tulisan berikut ini, sejauh mungkin berupaya menjelaskan beberapa sebab kemandegan-kemandegan pembangunan ekonomi, politik, dan sosial. Dan lebih dari itu, juga menjelaskan kerangka paradigma- teoritik dari kebijakan pembangunan ekonomi di masa Orde Baru ini, serta beberapa implikasinya.

Modernisasi, yang menunjuk pada satu tipe perubahan sosial yang begitu spektakuler, yang muncul di Eropa Barat sejak abad ke 18, kini nyaris merupakan suatu gejala *massif* yang melanda hampir seluruh bangsa di muka bumi ini. Tipe perubahan sosial yang telah menjadi semacam *mainstream* itu, bagi bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya bangsa-bangsa yang dikategorikan Dunia Ketiga, dijadikannya sebagai arah dan strategi pembangunan sebagai upaya memodernkan dirinya dengan suatu keharusan mengikuti prosedur-prosedur, institusi-institusi, norma-norma dan nilai-nilai dari modernisasi yang telah dilakukan oleh negara-negara maju. Keniscayaan semacam itu berangkat dari asumsi utama Teori N mengenai "*keniscayaan historis*", yang oleh Alberto Guerreiro Ramos digambarkan teramat deterministik, dimana jalan pikiran kita tentang industrialisasi dan pembangunan pada umumnya di negara-negara terbelakang dikuasai dan dipengaruhi oleh generalisasi Marxis yang menyatakan bahwa sejarah negara-negara maju atau negara-negara industri yang sudah mapanlah yang menunjukkan jalan perkembangan yang harus dilalui oleh negara-negara yang lebih terbelakang.

Sejauh menyangkut modernisasi, asumsi utama Teori N tersebut adalah, bahwa ada satu hukum keharusan historis-politis yang memaksa setiap masyarakat bangsa untuk berusaha mencapai tingkat yang sudah dicapai oleh apa yang dinamakan masyarakat-masyarakat yang sudah maju atau modern (lihat, Ramos, dalam Beling & Totten (ed.): 1970: 92). Cara pendekatan teori ini kemudian lazimnya menggunakan dikotomi-dikotomi seperti negara maju lawan negara sedang berkembang, masyarakat-masyarakat "referensi" (model) lawan masyarakat-masyarakat "pe-

ngikut". Atau menurut istilah Andre Gunder Frank dan Wallerstein, berturut-turut, masyarakat "*metropolis*" melawan masyarakat "*satelit*", dan masyarakat "*pusat*" melawan masyarakat "*pinggiran*". Dalam konteks global, dikotomi dan polarisasi semacam inilah yang menggambarkan tajamnya persoalan etnosentrisme, yakni *Eurocentrism* (menurut Bjorn Hettne) dan *Americacentrism* yang kental menggiringi modernisasi di dunia-dunia ketiga.

Akar dari semua itu, menurut Bjorn Hettne (lihat, Kamanto Sunarto, 1990: x), berangkat dari paradigma modernisasi; suatu paradigma yang menyandarkan diri pada pemikiran sosial Barat yang mencoba memaksa menjejalkan pengalaman-pengalaman masyarakat industrial Eropa-Amerika ke dalam perkembangan masyarakat-masyarakat Dunia Ketiga. Teori-teori dan pemikiran-pemikiran tentang perkembangan sosial masyarakat Dunia Ketiga dipaksa menggantungkan diri pada pengalaman kesejarahan dunia Barat. Inilah yang dikecam oleh Ramos, sebagai "*tahayul ideologis*" yang melekat pada konsep modernisasi.

Gejala ini, dalam pandangan Ramos, di samping telah mengukuhkan adanya dominasi masyarakat Barat yang telah maju atas masyarakat-masyarakat Dunia Ketiga, juga telah menafikkan bagi kemungkinan bangsa-bangsa di dunia ketiga untuk memodernkan dirinya sendiri dengan seperangkat prosedur, institusi, nilai dan norma yang secara *genuine* dan potensial memang telah dimiliki oleh masing-masing bangsa di Dunia Ketiga.

Namun sayangnya, kebanyakan bangsa-bangsa di dunia ketiga, lebih menampilkan kurangpercayaan diri untuk menjadi modern dengan seperangkat prasyarat -baik prosedur, nilai maupun norma- yang telah dimilikinya, tanpa harus menjadi *epigon* dari seluruh langkah kemajuan Barat (baca, Eropa dan

Amerika). Kenyataan ini lebih mudah dijelaskan oleh sebab bangsa-bangsa Dunia Ketiga, masih banyak yang menyisakan pada dirinya mentalitas sebagai orang yang terjajah.

Keharusan percaya diri itu, bukan berarti meneguhkan sikap menutup diri (eksklusif) dari segala tuntutan perubahan, tetapi lebih menegaskan akan pilihan-pilihan prosedur, nilai, dan norma dalam memodernkan diri bangsa yang sesungguhnya pilihan-pilihan itu ada pada diri bangsa itu sendiri. Penegasan ini, bila ditegaskan secara lebih *radix* lagi, adalah penegasan akan jati diri manusia, yang tak terbedakan satu sama lain akan hak-hak dasarnya. Rentangan dikotomi masyarakat "*model*" dengan masyarakat "*peniru model*"; "pusat" dengan "pinggiran"; "*superordinat*" dan "*subordinat*", sesungguhnya telah menafikkan makna hak dasarnya tersebut. Implikasinya, memunculkan dikotomi baru; masyarakat "*yang menang*" (yang menguasai) dan "*yang kalah*" (yang dikuasai).

Sejalan dengan hal itu, baik Theodor W. Adorno maupun Peter L. Berger memiliki pendekatan yang sama dalam melihat dialektika sejarah umat manusia, dimana yang lazim dilihat oleh banyak orang, bahwa sejarah adalah milik mereka yang menang, dan bukan sejarah mereka yang terkalahkan. Menurut Adorno, dalam *Negative Dialektik*-nya, kesejarahan mereka yang terkalahkan ini kemudian diungkap dan dirumuskan sebagai "keadaan yang negatif" yang membuat mereka menderita. "keadaan yang negatif" inilah kemudian menjadi titik awal segala pemikiran dan penilaian manusiawi untuk selanjutnya dirumuskan ke dalam suatu negasi dari "*keadaan yang negatif*" itu (*negatio negationis*), dalam rangka upayanya mengubah dan mengatasi situasi penderitaan. Inilah pengalaman yang azali dan spontan dari kesadaran

manusiawi, yang tidak harus diingkari dalam setiap proses modernisasi. Barangkali, pandangan Adorno ini agak dekat dengan preposisi Karl Marx; "bukan kesadaran yang membentuk keadaan, melainkan sebaliknya, keadaanlah yang membentuk kesadaran".

Karena itu, ketika menyingung "biaya-biaya manusiawi" yang diderita masyarakat Dunia Ketiga sebagai akibat pengekorrannya pada pengalaman dan paradigma Barat, Peter L. Berger dalam *Pyramids of Sacrifice*, -secara garis besarnya- mengatakan bahwa setiap manusia -dengan demikian juga setiap bangsa-, memiliki hak dasarnya atas suatu dunia yang "bermakna" baginya, serta atas "partisipasi kognitif"nya dalam mengartikan dan merumuskan definisi-definisi situasi dalam rangka mengatur dunianya sendiri. Kesadaran manusiawi tentang suatu dunia dengan situasinya yang beragam dan berbeda-beda itulah yang sering diabaikan dan direduksi dalam proses modernisasi.

Menurut Berger, apa yang dicanangkan sebagai modernisasi, -yang kemudian ditiru oleh kebanyakan Dunia Ketiga dengan bahasa "pembangunan", - tak jarang merupakan suatu ideologi dan "mitos" yang mengabaikan pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Kesimpulan Berger -sekaligus menjadi peringatannya, bahwa modernisasi menuntut harga yang tinggi pada tingkat makna. Mereka yang tidak bersedia membayar harga ini, kata Berger, harus dipandang dan diperlakukan dengan hormat, dan tidak boleh diremehkan sebagai "terbelakang" atau "irasional". Manusia berhak hidup di dalam sebuah dunia yang mengandung makna; makna yang tumbuh dari partisipasi kognitifnya sendiri. Menghormati hak ini merupakan suatu keharusan moral bagi kebijaksanaan politik (lihat, Peter L. Berger, 1982: 168-190).

ada satu realitas tunggal; yakni, realitas yang bersemayam di balik paradigma modernisasi. Ideologi yang menganjurkan "pembangunan" itu ditunjuk sebagai "*developmentalism*" atau "*growthmanship*" -suatu perangai pembangunan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi. Ideologi pembangunan kapitalis yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi ini, didasarkan pada mekanisme pasar. Kemanfaatan yang diperoleh, diasumsikan akan dengan sendirinya meluas ke semua sektor dalam masyarakat. Dalil ini disebut sebagai "pengaruh yang menetes ke bawah" (*trickle-down effect*). Kesejahteraan masyarakat secara luas akan dengan sendirinya diperoleh melalui pertumbuhan ekonomi dengan pasar sebagai penuntunnya. Dalam hal ini, kita pasti ingat kaidah "*invisible hand*" Adam Smith; tokoh pengulu teretusnya kapitalisme merkantilis dan teori ekonomi klasik, yang begitu optimis mengenai pertumbuhan ekonomi sebagai pemacu meningkatnya kemakmuran masyarakat dan negara melalui ekspansi pasar dan akumulasi kapital.

Namun, pendasaran pertumbuhan pada mekanisme pasar ini, dalam pengalaman-pengalaman yang terjadi di Dunia Ketiga justru mengalami pembelokan dari pertumbuhan ekonomi yang dituntun oleh mekanisme pasar menjadi pertumbuhan ekonomi yang dituntun oleh dalil kepentingan politik negara (penguasa). Nyata sekali, kekuasaan kemudian memegang peranan penting dalam penguasaan, alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi. Akibatnya, batasan-batasan peran antara negara yang menjalankan fungsi politik (peayanan publik), dan pasar yang menjalankan fungsi ekonomi, kemudian menjadi semakin kabur. Menurut Soetandyo Wignjosuebrot (1995), "Aktor ekonomi yang bertanggung jawab menjaga pertumbuhan kemakmuran

dan yang harus mengefektifkan seluruh institusi distribusi pendapatan di negari-negeri Dunia Ketiga, *nyatanya* --tekanan dengan huruf Italic sengaja saya (pen.) berikan-- adalah teknokrat-teknokrat yang telah menjelma menjadi -atau sekurang-kurangnya erat berafiliasi dan berkomitmen pada- para politisi penyelenggara pemerintahan negara yang berkuasaan. Atau, walaupun para aktor itu adalah usahawan-usahawan swasta, mereka itu umumnya adalah produk binaan --karbitan (pen.)-- yang dibesarkan oleh pemerintah, tentu saja dengan memperoleh fasilitas-fasilitas khusus yang diberikan oleh para penguasa penyelenggara ne-gara". Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan apa yang sering disebut sebagai *erzats capitalism*, yang melahirkan kapitalis-kapitalis karbitan.

Ideologi pembangunan kapitalis yang dijalankan di negeri-negeri Dunia Ketiga ini, pada akhirnya sulit meyakinkan cita-citanya seiring dengan kritik yang diajukan terhadapnya: Siapa sebenarnya yang paling banyak diuntungkan dengan sejumlah manfaat yang diperoleh, dan Siapa yang mengambil keputusan ? Pertanyaan itu dapat pula diajukan seperti ini: Pertumbuhan siapa? dan Pasar siapa? (lihat, Berger, 1982: 45-46). Pertanyaan semacam itu amat relevan diajukan, mengingat ideologi pembangunan kapitalis ini ternyata hanya menguntungkan mereka yang berada pada posisi "*centrum*" -yang sedikit jumlahnya-, dan merugikan sejumlah besar mereka yang berada pada posisi "*periphery*" atau "marginal". Proses yang terjadi, menurut Dawam Rahardjo (1988: 203), bukanlah *eco-development*, melainkan pembangunan yang merupakan bagian dari sistem kapitalisme dan ekonomi dunia, yang dipimpin dan didominasi oleh elit modern yang terdiri dari elit metropolitan, elit primer di tingkat nasional, dan elit

sekunder di tingkat daerah. Karena itu, ide pertumbuhan dalam ideologi kapitalisme, dikecam oleh Berger sebagai "mitos" dari langgam modernisasi (pembangunan) di negeri-negeri Dunia Ketiga.

Dari gambaran di atas, harus diakui, sebagian besar para pengambil kebijakan mengenai pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, telah secara nyata menunjukkan keterjeratannya ke dalam tahayul ideologis itu. Ini diperlihatkan -untuk kasus model pembangunan di Indonesia, baik di bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya-, upaya mencapai taraf kemodernan, tahap-tahap yang harus dilaluinya secara konsisten mengikuti apa yang digariskan oleh para pencetus dan eksponen-eksponen dari teori evolusi sosial, -kita bisa menunjuk pada paradigma pemikiran sosial klasik maupun modern-, di antaranya, Karl Marx yang membahas peralihan masyarakat feodalisme ke kapitalisme; hubungan sosial ala Durkheim, dari "solidaritas mekanik" ke "solidaritas organik"; rasionalisasi dan meluasnya pengaruh birokrasi dari Max Weber; perubahan sosial Tonnies dari "gemeinschaft" menuju "gesellschaft"; peralihan pola-pola budaya ala Parsons, dari pola "askriptif partikularistik" menuju pola "prestasi universalistik"; dan perubahan sosial-ekonomi menurut versi Lerner, W.W. Rostow, dan Riggs, yang menafsirkan perubahan itu, berturut-turut sebagai perubahan dari masyarakat yang "tradisional", "belum berkembang", dan "fused" (belum ada diferensiasi) bergerak melalui tahap-tahap "peralihan" (transitional), "take-off" dan "prismatic", sampai pada akhirnya mereka mencapai tahap "modernitas", "mass consumption", dan "regraction" (diferensiasi yang sangat tinggi). (lihat, Belling & Totten, 1985: 144-n). Dengan mencermati pemikiran W.W. Rostow

hususnya, -yang kemudian pemikiran ini dijadikan landasan konsep dan arah pembangunan di Indonesia-, tahap-tahap pembangunan ekonomi untuk Dunia Ketiga harus dimulai sejak dari tahap "belum berkembang" (under-developed) ke tahap peralihan berupa "tinggal landas" (take-off) untuk kemudian menuju ke tahap modern yang dicirikan dengan "konsumsi massa" (*mass consumption*), suatu konsumsi massa tingkat tinggi, dan berlimpah-ruah.

Tentunya, kita tak akan bicara tentang pencapaian tingkat konsumsi semacam itu sebagai ciri modernitas, jika tak bicara pula tentang kapitalisme dan rasionalisasi. Sebab keduanya; kapitalisme dan rasionalisasi, masing-masing menurut Karl Marx dan Max Weber, merupakan konsep kunci untuk memahami modernitas (lihat, Ross Poole, 1993:35).

Kapitalisme, sebagaimana didefinisikan oleh Louis Blanc, adalah gejala: "pencaplokkan modal oleh sekelompok orang, dengan menyisihkan yang lain". Sementara Karl Marx, merumuskan pengertian kapitalisme sebagai: "rezim ekonomi dan sosial, dalam mana kapital, sebagai sumber pendapatan, pada umumnya bukan dimiliki oleh mereka (kaum buruh/proletar) yang menjadikannya berfungsi, melalui kerja jasmaninya" (lihat, M. Dawam Rahardjo: 1993: 7). Dari pengertian tersebut, kapitalisme menyimpan dua unsur pokok, yaitu: pemusatan modal, dan eksploitasi.

Kapitalisme, karenanya tidak jarang mendorong organisasi ekonomi modern untuk selalu meningkatkan produksi demi produksi, dengan bahasa lain pertumbuhan ekonomi demi konsumsi-konsumsi manusia kapitalis yang nyaris tak pernah terpuaskan. Mengiringi isu produktivitas dalam kapitalisme ini, rasionalisasi dalam proses produksi merupakan prasyarat bagi munculnya keunggulan

komparatif produk-produk kapitalis. Kemudian jenis rasionalisasi yang dominan dalam kapitalisme adalah rasionalitas ilmiah-teknologis atau yang disebut rasionalitas instrumental. Hal yang diutamakan adalah efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan. "Bertindak rasional, dalam pengertian kapitalis yang umum, -disamping untuk mengejar tingkat produksi demi produksi, konsumsi ke konsumsi tanpa batas-, adalah juga mengejar kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri", demikian pengantar DR. J. Sudarminta SJ., dalam *Moralitas dan Modernitas*. Sehingga nilai yang dominan dalam kapitalisme, selain konsumsi tingkat tinggi, adalah kekuasaan; yakni kekuasaan yang termanifestasikan atas alam (sumber-sumber daya alam) yang telah berkembang berduaan secara simbiotis dengan kekuasaan segelintir manusia atas modal, dan atas manusia-manusia lainnya dalam proses produksi. Keberadaan buruh kemudian dipandang semata-mata sebagai alat produksi. Dan ini merupakan manifestasi kekuasaan manusia atas manusia secara naif.

Konsekuensi pandangan ini dalam konteks pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, acapkali memunculkan suatu fenomena dimana kelompok buruh atau masyarakat bawah pada umumnya (yang tidak memiliki aset dan akses apapun dalam gerak pembangunan), sering dijadikan sebagai kelompok *sacrifice* dalam dan untuk pembangunan itu. Jargon yang kemudian lazim kita dengar adalah, "pembangunan itu memerlukan pengorbanan!". Tapi idiom pembangunan dan pengorbanan itu sesungguhnya oleh siapa, dan untuk siapa?

Kemudian untuk mengukuhkan arah dan strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi ini, dan dalam upayanya menuju tahap "tinggal landas", pemantapan

stabilitas politik menjadi syarat mutlak. Pembangunan kemudian lebih mencerminkan "ke-mauan" birokrat penguasa, ketimbang aspirasi rakyat. Dalam konteks ini, mereka yang merupakan sasaran kebijaksanaan pembangunan ekonomi politik nasional, sering ditempatkan dan diandaikan pada posisi "tidak sadar diri"; suatu pengandaian yang mengabsahkan program "konsientisasi" yang bersifat searah dan sepihak. Sementara barisan teknokrat dan birokrat -sebagai subyek pelaksana program konsientisasi- mengandaikan diri mereka sebagai kelompok yang paling "sadar diri", paling "tahu", dan paling "benar".

Dalam kerangka filosofis, cara pandang di atas dinilai secara tepat oleh Berger sebagai "*kecongkaan epistemologis*" yang berawal pada kesalahan filosofis, di mana kesalahan tersebut terletak pada apa yang sering disebut "pandangan hirarkhis mengenai kesadaran". Menurut Berger, pandangan ini mengandung nilai yang berbau abad pertengahan, di mana terdapat ajaran jaman skolastik tentang "mata rantai keberadaan" -dengan Tuhan yang maha tahu, maha benar di satu ujung, binatang-binatang yang tak berakal di ujung yang lain, dan di tengah-tengahnya berada kita umat manusia, yang dengan teliti disusun menurut tingkat-tingkat berdasarkan kedekatannya pada salah satu dari kedua kutub tersebut (lihat, Berger, 1982:114). Hal yang lazim dimengerti kemudian, karena keberadaan raja (penguasa) sering dipersonifikasikan dekat -bahkan menyamai- Tuhan, maka kedudukannya secara kognitif dipandang "istimewa". Personifikasi semacam itu menjadikan posisi Raja sebagai sosok yang tak pernah bisa salah -*The King can do no wrong*!

Tengara Berger tersebut, kiranya juga tepat untuk melihat hubungan sosial-politik antara penguasa dengan massa rakyat dalam

konteks budaya dan pembangunan kita. Menurut Kuntowijoyo, kendati konsep sosial-politik kita telah mengenal dan menggunakan idiom-idiom pasca budaya lokal, namun, setidaknya-tidaknya dalam kenyataan, sistem sosial-politik kita masih mewarisi pemahaman masa lalu, dengan mana manusia dibagi-bagi dalam strata sosial yang polaristik, di satu pihak ada stratum gusti, di lain pihak ada stratum kawula. Stratum yang pertama, melalui keharusan supranatural -yang memang demikian diasumsikan- memiliki kewenangan memanipulasi simbol-simbol dan makna-makna sedemikian rupa sehingga seolah-olah kekuasaannya adalah sebuah kemutlakan (lihat, Kuntowijoyo: 1994: 58). Sementara pada stratum kedua, ditanamkan secara kuat dalam struktur mentalitas dan budayanya suatu teologi pasrah, tergantung, dan serba menunggu atas titah (petunjuk) sang gusti.

Masih dalam kerangka cara pandang seperti itu, pembangunan (modernisasi) yang dijanjikan terlihat merentangkan suatu kategorisasi yang dikotomis; "subyek" dan "obyek", sehingga yang nampak, proses pembangunan lebih bersifat "top-down"; dimana sang "subyek

menentukan dan menjejalkan "citra maknanya" kepada sang "obyek". Hal ini memantapkan suatu kesan bahwa pembangunan kemudian menjadi semacam "ideologi" yang represif. Dalam istilah Dawam Rahardjo (1989: 199), adalah "rezim pembangunan yang represif", dengan mana kekuatan militer menjadi pengendali utama birokrasi dan jalannya pembangunan ekonomi yang diatur secara terpusat. Munculnya pemikiran kritis mengenai konsep dan jalannya pembangunan "diharamkan" dan dianggap sebagai "gangguan", sehingga secara nyata berakibat mematikan aspirasi dan partisipasi kognitif masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Idiom pertumbuhan ekonomi berbarengan dengan stabilitas politik, kemudian menjadi "panglima" pembangunan, yang secara praxis -sadar atau tidak-, mengenyampingkan sejumlah pertimbangan "ongkos-ongkos sosial dan biaya manusiawi", dan sekaligus "biaya-biaya natur

yang cukup menambah beban lingkungan hidup. Jika terdapat perhatian terhadap pertimbangan-pertimbangan itu, porsinya masih tidak seberapa bila dibandingkan dengan banyaknya "kurban" yang berjatuh, seba-

Nampaknya untuk kasus pembangunan ekonomi di Indonesia, setidaknya-tidaknya terlihat sepuluh tahun terakhir ini, boleh dibilang telah masuk ke dalam "kegilaan" nilai semacam itu. Ini bisa ditunjukkan oleh keprihatinan para pakar ekonomi kita atas salah satunya gejala merebaknya praktik monopolistik dan oligopolistik, yang dalam praktiknya tidak lagi mengindahkan hukum pasar secara normal dan wajar, yang menjadikan distorsi pasar seolah-olah absah demi keuntungan segelintir pelaku monopoli dan oligopoli tersebut.

bagai akibat dari terkonsentrasinya sumber-sum-

ber kemakmuran pada segelintir orang yang memperoleh perlindungan ketat secara politis dari birokrat penguasa.

Kita memang tidak menutup mata bahwa modernisasi pembangunan ekonomi yang telah berjalan selama tiga dasawarsa, telah membuahkan hasil dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan. Namun, karena proses pembangunan yang dijalankan tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, dalam arti melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan sekaligus penentuan pilihan-pilihan yang tepat bagi hajat diri masyarakat itu sendiri, maka hasil pembangunan tidak serta-merta menyentuh lapisan masyarakat bawah secara luas. Akibat lebih lanjut dari perkembangan yang tidak merata itu, adalah terjadinya kelimpahan di satu pihak dan kelangkaan pada bagian yang lebih besar di pihak lain. Kondisi seperti ini, memunculkan berbagai ketimpangan dalam berbagai segi kehidupan, baik politik, ekonomi maupun sosio-kultural. Pembangunan kemudian terkesan elitis. Demokratisasi yang semula diyakini akan tumbuh berseiringan dengan laju pertumbuhan ekonomi, nyatanya hanya menjadi impian bagi mereka yang tersisihkan dari proses pembangunan.

Mempertegas Arah Komitmen Moral

Karena watak filosofisnya yang demikian khas, kapitalisme dalam mendorong organisasi-organisasi ekonomi modern untuk meraih tingkat produktivitas dan pertumbuhan yang optimal, menjadikan rasionalitas instrumental yang muncul secara dominan, cukup sering mendorong dan menyarankan kita untuk melonggarkan ikatan-ikatan moral dengan melanggar hukum. (lihat, Ross Poole, 1995: 13).

Watak demikian, jelas akan mewarnai watak modernisasi (pembangunan) yang akan

dijalankan. Sehingga, seorang individu yang modern, yang rasional, justru akan menolak klaim-klaim moralitas ketika ia menjadi bagian dari masyarakat komersial-kapitalistik. Karena, "moralitas hanyalah sebuah sistem ilusi", demikian tegas Bernard Mandeville. Dan "modernitas, harus sama sekali menolak moralitas", demikian nihilisme dari Nietzsche.

Nampaknya untuk kasus pembangunan ekonomi di Indonesia setidaknya-tidaknya terlihat sepuluh tahun terakhir ini-, boleh dibilang telah masuk ke dalam "kegilaan" nilai semacam itu. Ini bisa ditunjukkan oleh keprihatinan para pakar ekonomi kita atas salah satunya gejala merebaknya praktik monopolistik dan oligopolistik, yang dalam praktiknya tidak lagi mengindahkan hukum pasar secara normal dan wajar, yang menjadikan distorsi pasar seolah-olah absah demi keuntungan segelintir pelaku monopoli dan oligopoli tersebut.

Konon, menurut catatan Prof. DR. Nuri-mansyah Hasibuan (Republika, 8 Mei 1995), praktik oligopoli -yang juga dikhawatirkan mengarah ke monopoli- di sektor industri, telah mencapai ambang batas ketidawajaran; yakni 72 persen, yang menyebabkan meningkatnya rintangan masuk (*barrier to entry*) ke dalam kegiatan ekonomi atau kewirausahaan. Hal demikian memberikan peluang yang cukup kecil bagi tumbuhnya usaha dan kesempatan kerja bagi mereka yang berada di luar jaringan pemegang kendali oligopoli dan monopoli. Ini menjadikan pengusaha-pengusaha kelas "bawang" termasuk koperasi-koperasi yang notabene mewedahi usaha-usaha kecil, akan sama-kin terpuruk nasibnya.

Dalam hal ini pula, kita masih ingat kasus pengambilalihan Kanindotex dari GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) oleh suatu konsorsium dengan atas nama PT.

Aspac Century Corporation. Sebesar 90 % saham Kanindotex untuk konsorsium itu, dan sisanya, 10% diberikan kepada 100 koperasi primer. Nampaknya, bagi koperasi yang konon merupakan soko guru perekonomian Indonesia, kini nyaris terpuruk dan tak berdaya menghadapi sistem perekonomian yang terkonsentrasi dalam bentuk oligopolistik dan monopolistik.

Dalam kasus Kanindotex itu, Ketua Dekopin Dr. Sri Edi Swasono berkesimpulan, bahwa kasus itu secara transparan menunjukkan GKBI memang sengaja ditendang dari Kanindotex (Republika, 20 Mei 1995). Kesewenang-wenangan pelaku bisnis -yang berkolusi dengan penguasa- benar-benar telah menjadi kamus dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Tetapi sekali lagi, untuk siapa pertumbuhan itu ?

Mustinya, jika kita konsisten dengan komitmen kita untuk menjadikan koperasi benar-benar menjadi soko guru perekonomian Indonesia, pemberdayaan koperasi -yang nota bene menjadi penyanggah perekonomian rakyat- seharusnya menjadi perhatian yang serius di tengah-tengah percaturan global perekonomian dunia.

Dalam upaya memacu tingkat pertumbuhan yang optimum itu, kesenjangan perlakuan pemerintah terhadap ekonomi rakyat dengan ekonomi konglomerat sulit ditutup-tutupi. Sebagai misal, alokasi kredit yang diberikan oleh sindikasi bank pemerintah kepada 34,45 juta usaha kecil -sebagai perekonomian rakyat- hanya 56 persen, atau sekitar 16,888 trilyun rupiah dari total kredit yang dikucurkan sebesar 30,158 trilyun rupiah. Selibuhnya, yaitu 44 persen atau sekitar 13,27 trilyun diberikan kepada 22 konglomerat (Kompas, 8/5). Kita tentu bisa menghitung, berapa perbandingan perolehan kucuran dana

untuk masing-masing sektor usaha ? Beda perlakuan semacam inilah yang kemudian menimbulkan kesenjangan di bidang usaha, terutama pada akses modal dan produksi. Ketimpangan tersebut pada akhirnya juga mengarah pada timpangnya tingkat konsumsi masyarakat. Sehingga menurut sebagian pengamat sosial-ekonomi, fenomena semacam itu, secara luas memunculkan kesan bahwa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terhimpit dengan kemiskinannya. Jika terdapat tetesan ke bawah, di samping nilainya tidak seberapa, masih terkesan sebagai derma atau belas kasihan, dan belum dijadikan sebagai suatu kriteria eksplisit dalam bentuk penetapan kewajiban-kewajiban peran yang berbobot moral atau semacam kesadaran *noblesse oblige* dari kaum elit (dalam hal ini, penguasa dan pengusaha).

Sebagai contoh pembenaran hal di atas, masih hangat dalam ingatan kita, betapa naluri "menerkam" dan kemudian "mencabik-cabik" dari sejumlah kecil pengusaha besar kita terhadap pengusaha-pengusaha kecil, didemonstrasikan ketika terjadi akuisisi beberapa pengusaha tekstil, yang tidak berselang lama, terjadilah kenaikan harga bahan baku tekstil yang menyebabkan tersungkurnya beberapa perusahaan tekstil yang tergolong lemah. Demikian pula, betapa tata niaga cengkih yang tersentral melalui institusi ekonomi modern BPPC, dengan menunjukkan "arogansi bisnis"nya, telah melibas sumber kesejahteraan petani cengkih. Hal yang sama juga terjadi dalam tata niaga garam, jeruk, pupuk sampai besi bekas. Dalih politis apapun untuk "membenarkan" arogansi tersebut, tak bisa ditutupi oleh fakta pengungkapan polos dari para petani yang bersangkutan.

Dalam hal tiadanya penetapan kewajiban-kewajiban moral secara politis, dan yang tidak

sekadar bersifat karikatif dalam meneteskan kemakmuran ke bawah -yang sesungguhnya dengan kemakmuran dapat memacu tumbuhnya peluang usaha masyarakat bawah-, bisa kita lihat pada kasus Deklarasi Jimbaran, dan terakhir Keppres 90 tanggal 30 Desember 1995. Keppres 90 mengatakan, bahwa barang siapa berpenghasilan bersih (setelah pajak) Rp 100 juta atau lebih, dan ingin memberikan sumbangannya tidak melampaui 2 persen, maka sumbangan itu boleh dipotongkan dari pendapatan kena pajak. Bahwa isi Keppres itu, yang tepatnya berbunyi: "Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi dapat membantu dengan setinggi-tingginya 2 persen dari laba atau penghasilan setelah Pajak Penghasilan yang diperolehnya dalam 1 (satu) tahun pajak untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I", sama sekali bukan bentuk dari penetapan kewajiban tetapi sekadar dimaksudkan untuk memberi insentif pajak bagi para penyumbang yang sumbangannya khusus dipakai untuk memberikan bantuan kepada Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Istilah yang dipakai adalah "dapat", bukan "wajib" atau "harus". Jadi isi Keppres itu sama sekali bukan suatu penetapan kewajiban. Terlepas dari itikad baik maksud Keppres 90 itu, yang jelas bahwa bentuk-bentuk tetesan ke bawah masih bersifat karikatif, dan belum menjadi ketentuan hukum yang secara absolut mengikat kesadaran moral pelaku-pelaku ekonomi. Apalagi secara substantif, belum pula menyentuh kebutuhan yang paling azasi masyarakat bawah, yakni berupa pemenuhan tuntutan kualitas hidup, dan bukan sekadar standar hidup.

Dalam kaitannya dengan kepedulian terhadap masyarakat prasejahtera -untuk menyebut masyarakat miskin-, nampaknya para elit nasional masih menggunakan konsep teologi

"Kamis" warisan Raja-Raja Jawa masa lalu; di mana setiap hari Kamis, sang Raja keluar istana untuk memberikan derma kepada warga masyarakatnya yang miskin, yang disebutnya kemudian sebagai kaum "pengemis".

Yang membedakannya dengan masa republik ini dalam menyalurkan derma tersebut, adalah pada format kelembagaannya, namun dalam nuansa normatifnya masih tetap segaris dengan masa lalu.

Bagaimana dengan Pembangunan Desa-Kota ?

Dalam perspektif ketergantungan, corak ekonomi kapitalis dengan campur-tangan pemerintah secara absolut, yang mengukuhkan sistem monopoli dan oligopoli, pada akhirnya justru mempertajam kesenjangan sosial-ekonomi. Masyarakat, secara ekonomi terentang antara mereka yang kuat akses dan asetnya dalam proses produksi, dan mereka yang lemah yang lebih banyak tereksplotasi oleh kelompok ekonomi kuat, yang justru memperoleh perlindungan politik birokrasi.

Dengan mencermati perspektif ketergantungan ini pula, nampaknya pembangunan kota dan desa di Indonesia bisa dikategorikan dalam perspektif ini. Di mana kota sebagai pusat (metropolis) menyerap surplus ekonomi (dan termasuk tenaga kerja yang bermigrasi) dari desa (satelit/pinggiran). Dan karena itu terdapat ketimpangan antara pembangunan kota dengan desa. Kesenjangan sosial-ekonomi di tengah-tengah masyarakat, sesungguhnya bisa ditelusuri dari senjangnya pembangunan antara desa dan kota. Hal ini ditunjukkan oleh timpangnya alokasi kredit antar sektor pembangunan; sektor pedesaan dan perkotaan. Sampai Oktober 1994 misalnya, sektor pertanian merupakan sektor terkecil dalam perolehan kredit bank jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian mem-

peroleh kredit sebesar 7,63 persen, turun sebanyak 41 persen dari tahun 1993. Sementara sektor perdagangan, jasa, dan industri jauh lebih tinggi, masing-masing mencapai 23,72 persen, 25,71 persen, dan 31,17 persen (Mariman Darto, *Republika*, 8 Mei 1995).

Yang memprihatinkan adalah bahwa pergeseran struktur perekonomian antar sektor itu ternyata tidak secara konsisten diikuti oleh pergeseran distribusi tenaga kerja antar sektor pembangunan. Di satu pihak, prosentase tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor industri hanya meningkat dari sekitar 11 persen pada tahun 1971, menjadi sekitar 17 persen pada tahun 1991. Sedangkan di pihak lain, prosentase tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian hanya turun dari sekitar 67,5 persen menjadi sekitar 55 persen untuk periode yang sama (Revrison Baswir, 1994).

Data terakhir dari Bappenas (1995), menyebutkan: pertanian pedesaan merupakan sektor terbesar yang mampu menyerap tenaga kerja sampai 66,39 persen. Sementara sektor perdagangan, industri dan jasa masing-masing menyerap 10,0 persen, 7,9 persen, dan 7,3 persen. Di perkotaan, perdagangan perkotaan merupakan sektor tertinggi dalam menyerap tenaga kerja (27,80 persen), diikuti oleh sektor industri 17,0 persen dan pertanian 10,91 persen. Jika dikalkulasi (desa-kota), pertanian tetap merupakan sektor paling dominan menyerap tenaga kerja, dengan total 50,58 persen. Sisanya, perdagangan 15,73 persen, jasa 13,46 persen dan industri 10,48 persen.

Jika dilihat perbandingan antara alokasi dana masing-masing sektor, dengan kemampuan masing-masing sektor untuk menyerap tenaga kerja, angka-angka di atas secara jelas mengungkapkan terjadinya pelebaran ketimpangan kesejahteraan angkatan kerja di Indonesia. Terlebih lagi jika dilihat, bahwa sektor

pertanian di Jawa yang memasok kebutuhan pangan nasional sebesar 60 persen dengan melibatkan tenaga kerja (petani) lebih dari separo total angkatan kerja, ironinya justru kesejahteraan sebagian mereka tidak terangkat secara baik bersamaan dengan surplus pangan yang diproduksinya. Tentu ada sesuatu yang salah dalam hal ini.

Menyoroti ketimpangan desa-kota secara umum, Sayogyo (1992) mengutarakan dua sebab ketimpangan itu, yaitu market failure, dan political failure. Yang pertama terjadi karena

1. Kemampuan daya beli penduduk di pedesaan sangat rendah bila dibandingkan penduduk kota. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat desa yang termasuk dalam angkatan kerja, hanya memperoleh upah/pendapatan yang sangat kecil yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar mereka.
2. Sempitnya kesempatan dan peluang berusaha di pedesaan.
3. Infrastruktur pedesaan yang tidak memadai untuk pengembangan produksi.
4. Pola penguasaan tanah sebagai alat produksi vital di desa timpang; dan;
5. Berbagai sebab di mana penciptaan output ekonomi pedesaan serta distribusinya mengalami hambatan pemasaran akibat terdesak oleh produk industri.

Penyebab kedua, political failure terjadi apabila struktur dan institusi ekonomi politik yang ada pada aras supra lokal telah menyebabkan distorsi dalam merepresentasikan kepentingan masyarakat desa. Hal ini dapat dipahami, bahwa proses pembangunan pedesaan tidak akan terlepas kaitannya dari suatu pengertian yang menyeluruh tentang pembangunan institusi ekonomi politik nasional. Siapa menguasai apa dan untuk kepentingan siapa institusi dan struktur ekonomi-politik itu bekerja, merupakan pertanyaan kunci yang dapat dikembangkan guna memahami dimensi pembangunan yang sangat kompleks. Pene-

kanan atas penguasaan sumber-sumber pertumbuhan pada segelintir orang, atau yang terpusat pada sekelompok masyarakat kota misalnya, secara potensial dapat menyebabkan kemandegan proses pembangunan secara menyeluruh.

Fenomena Piramida Terbalik; Bagaimana Pengendaliannya ?

Dalam perspektif teori ketergantungan tersebut, pembangunan harus diartikan sebagai "pemberdayaan" bukan "pemerdayaan" masyarakat yang tersisihkan oleh arus pembangunan ekonomi. Pemberdayaan itu diperlukan, sebab proses dan hasil pembangunan yang terkonsentrasi hanya memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada segelintir orang yang memang sudah dekat dengan kekuasaan, dan hanya menyisakan sedikit ruang usaha lapisan bawah. Dalam rangka inilah maka pemerintah, dengan political willnya harus menyediakan iklim perekonomian yang kondusif bagi pertumbuhan kelas bawah, termasuk pemerataan kesempatan usaha di sektor ekonomi subsisten, yang sesungguhnya dapat memacu daya beli masyarakat secara luas. Kolusi, monopoli, dan oligopoli, yang di tahun '95 ramai diperbincangkan, harus segera dienyahkan untuk menyingkirkan distorsi ekonomi yang menyesak usaha kelas bawah. Karena itu munculnya Undang-Undang Anti monopoli menjadi suatu keharusan bagi sistem perekonomian yang sehat di masa mendatang, yang jauh dari praktik-praktik kolusi, korupsi, monopoli dan oligopoli. Namun demikian, keefektifan aturan hukum bisa diwujudkan hanya bila didukung oleh komitmen moral para pelaku-pelaku ekonomi dan birokrat penguasa.

Namun demikian, hal yang paling mendasak di samping undang-undang anti trust tersebut, menurut Christanto Wibisono (Kompas,

8 Juli 1995), adalah UU yang jauh lebih hulu dan lebih strategik sifatnya. Yakni, yang menyangkut etika politik, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara penguasa atau pejabat birokrasi dengan pengusaha. Karena itu, menurutnya, deregulasi ekonomi harus simultan dengan deregulasi politik. Sebab sumber kartel ekonomi adalah kartel politik. Kartel beralih nasionalisme, tetapi berkiblat pada perelatifitasan moral dengan mengeruk "rezeki haram 2-K; kolusi dan korupsi".

Gambaran terkonsentrasinya struktur ekonomi di lapisan atas tersebut, yang merupakan "wajah" nyata dari sistem kapitalisme, persis seperti digambarkan oleh Laurence J. Peter dengan "Piramida Peter"-nya. Piramida Peter digambarkan sebagai piramida yang terbalik, dengan ujung di bawah. Jika pada piramida kuno (piramida Mesir), dimana ujungnya berada di atas dan landasannya di bawah, digambarkan oleh Peter, bagaimanapun besar landasannya, perkembangan/pertumbuhannya ke arah titik puncak pasti ada batasnya. Namun, dalam semangat kapitalisme yang menggebu-gebu, justru yang berlaku adalah piramida Peter ini. Karena dimulai dari bagian terkecil di bawah, arah perkembangan/pertumbuhannya (ke atas) tidak mengenal batas akhir. Piramida ini tidak akan berhenti tumbuh dengan cara diselesaikan (dipenggal begitu saja). Karena sifatnya yang tidak dapat membatasi diri itu, maka piramida ini akan tumbuh terus sampai dia terguling sendiri, remuk, dan hancur sendiri, atau sampai orang-orang yang membangunnya mengambil tindakan untuk mengendalikan pertumbuhannya (lihat, Laurence J. Peter, 1986: 27). Jika distorsi ekonomi nasional yang ditandai oleh saling merebaknya praktik monopoli, oligopoli dan kartel, dan dibiarkan terus-menerus berkembang tanpa batas, dan

tanpa ada political-will dari penguasa untuk merubahnya, maka siapakah sesungguhnya yang akan tetap bertahan untuk memperoleh keuntungan dengan situasi perekonomian seperti itu? Dan siapa pula yang akan semakin termarginalisasi dalam meraih kemakmuran? Jika melihat piramida Peter di atas, kelompok yang berada pada po-sisi "bawah" dan yang semakin ke "bawah"lah yang akan memperoleh sedikit dan semakin sedikit. Jadi, dengan menggunakan logika Peter, luas-sempitnya ruang gerak untuk aktivitas usaha, berimplikasi pada besar-kecilnya tingkat kemakmuran yang dicapai. Semakin ke lapisan bawah, semakin kecil untuk memperoleh peluang itu. Kita bisa mensejajarkan logika ini dengan kesejahteraan para petani, yang seluruh komponen dan institusi produksinya diatur ketat oleh struktur ekonomi di atasnya. Dalam penentuan proses produksi, para petani nyaris tak punya ruang gerak yang leluasa. Barangkali dengan kasus ini, kita bisa mempertanyakan lagi banyak hal di balik fenomena-fenomena ketimpangan yang ada, yang bisa saja kita kaitkan, misalnya, dengan mode of production dari Karl Marx; "Siapa menguasai apa, dan siapa menguasai siapa?" Jika ini merupakan pilihan moralitas pembangunan ekonomi nasional, kita mengkhawatirkan bila ternyata pelaku-pelaku ekonomi nasional -disadari atau tidak- justru membenarkan premis-premis ajaran Marxisme, di mana moralitas suatu masyarakat adalah moralitas kelas yang berkuasa, yang ditentukan oleh kelas yang mendominasi ekonomi.

Memang, tak mudah mencari jawaban yang akurat untuk menjelaskan kekhawatiran kita itu, terutama yang terkait dengan konteks mengejar konsumsi tingkat tinggi, dan kekuasaan demi kekuasaan -sebagai nilai dominan dalam kapitalisme-, kecuali pada ungka-

pan jitu Thomas Hobbes dalam Leviathan: "Suatu kecenderungan umum seluruh umat manusia, adalah hasrat akan kekuasaan abadi dan tak berkesudahan demi kekuasaan, yang berhenti hanya dalam kematian!".

Akankah itu merupakan bingkai nilai dan moralitas politik dari modernisasi pembangunan ekonomi kita di masa mendatang? Tentunya kita juga akan bertanya, bagaimana sebenarnya amanat GBHN diejawantahkan dalam praktik pembangunan? Serta bagaimana moral Pancasila, yang konon -seperti didoktrinkan dalam penataran P4-, menjadi peletak dasar konsep ekonomi Pancasila, mampu memberi warna sepak terjang pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam mencapai pertumbuhan? Dan bagaimana pula kesediaan pemerintah untuk secara arif mendengar berbagai pendapat kritis, dan melihat secara jernih anomali pembangunan yang terjadi dewasa ini? Jawaban-jawaban itu tentunya berpulang kepada para pelaksana resmi pembangunan negeri ini. Membiarkan, bahkan merestui sekelompok kecil orang melakukan pemupukan dan pemerluasan kebutuhan-kebutuhan dengan mengubah "kemewahan" menjadi "keharusan", adalah bertentangan dengan kearifan yang digerakkan oleh moral bangsa ini.

Bagi kita, tentu berharap, bahwa pemerintah tidaklah akan menjadi institusi yang "maha canggih", yang berada di atas segala kritik dan pendapat, dan yang gamang melihat anomali-anomali pembangunan. Sebagai suatu analog, kata-kata bijak Pierre Gallois patut pula kita camkan guna menarik pelajaran dalam kita melihat dan menyikapi sesuatu yang kita pandang "canggih" itu; "Kalau anda memasukkan data tak berharga ke dalam komputer, maka yang keluar darinya adalah data tak berharga pula. Tetapi, karena data tak berharga ini telah keluar dari sebuah sistem mesin

yang sangat mahal dan canggih, semua orang memuliakannya dan tak seorang pun berani mengkritiknya!". Tentunya, kita bukanlah bagian dari pengagum buta "mesin canggih" itu !

DAFTAR RUJUKAN

Berger, Peter L., *Pyramids of Sacrifice*, terj. A. Rahman Tolleng, *Piramida Kurban Manusia, Etika Politik dan Perubahan Sosial*, LP3ES, Jakarta: 1982.

Dawam Raharjo, *Esei-Esei Ekonomi Politik*, LP3ES, Jakarta: 1993

-----, *Pragmatisme dan Utopia Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Jakarta: 1993.

Kamanto Sunarto, "Pengantar", dalam Ian Roxborough, *Teori-Teori Keterbelakangan*, LP3ES, Jakarta: 1990

Kuntowijoyo, *Demokrasi & Budaya Birokrasi*, Bentang, Yogyakarta: 1994.

Mariman Darto, "Liberalisasi Ekonomi dan Agenda Baru Bangsa", *Republika*, 8 Mei 1995.

Peter, Laurence J., *Piramida Peter, Mungkinkah kita Mencapai Puncaknya*, Erlangga, Jakarta: 1986.

Poole, Ross, *Moralitas dan Modernitas*, Kanisius, Jakarta: 1993.

Ramos, Alberto Guerreiro, "Modernisasi: Menuju Suatu Model Kemungkinan", dalam Beling & Totten (ed.), *Modernisasi, Masalah Model Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta: 1985, hal. 90-148

Revrisond Baswir, *Ekonomi Politik Pertumbuhan dan Ketimpangan, Kajian Kritis Transformasi Perekonomian Indonesia 1986-1993*, makalah seminar HIPIIS; "Transformasi Sosial pada Masyarakat Semi Industri", Yogyakarta, 13 September 1994.

Sayogyo, *Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia dan Alternatif Penanggulangannya*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan, 1992.

Soetandyo Wignjosoebroto, "Pembangunan sebagai Masalah Sosial-Budaya: Ke Arah Ketergantungan atau Keberdayaan ?", Makalah Seminar pada Kuliah Kapita Selekt Sosiologi, PPS. Magister Sosiologi Pedesaan, Universitas Muhammadiyah Malang, Desember 1995.

Sudarminta SJ., *Pengantar, dalam Ross Poole, Moralitas dan Modernitas*, Kanisius, Jakarta: 1993.

Wahyu Widiarto, "Kartel, Korupsi, dan Inefisiensi", dalam Kompas, 19 Juli 1995.